BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa kasus kecurangan dan pelanggaran organisasional masih marak sehingga menjadi perbincangan hangat. Dewasa ini sering kita jumpai kolom-kolom berita, baik media cetak maupun elektronik yang menayangkan berita kecurangan. Sering kita dengar berita kecurangan tersebut antara lain korupsi, penyalahgunaan wewenang dan sebagainya. Memang benar adanya etika dan kejujuran merupakan primadona yang sangat sulit dicari.Seperti kasus petinggi perusahaan sekelas Enron dan Worldcom harus berakhir di penjara karena kasus kecurangan (pelanggaran etis). Mantan *Chief Financial Officer Enron* Andrew Fastow divonis enam tahun penjara di tahanan Houston, Texas. Sementara mantan pendiri dan *Chief Officer Worldcom*, Bernard Ebbers juga harus meringkuk selama dua puluh lima tahun di penjara Oakdale, Louisiana, Amerika Serikat. Fenomena pelanggaran etika atas skandal akuntansi dalam perusahaan ini telah memicu Sherron Watkins dan Cynthia Cooper menjadi seorang *whistleblower* dan mengungkapkan skandal korporasi tersebut kepada publik. [1]

Whistleblower adalah seorang yang pertama kali melaporkan tindakan pidana atau tindakan yang dianggap ilegal, baik di dalam organisasi atau ditempat lain kepada otoritas internal organisasi atau kepada lembaga

[1] Syaifah Rodliyah, *"Pengaruh Sifat Machiavellian, lingkungan Etikadan Personal Cost Terhadap Intensi Melakukan Whistleblowing"*, (Srripsi--UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemantau politik seperti media masa.[2] Di dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, *whistleblower* diartikan sebagai pihak yang mengetahui dan melaporkan suatu tindak pidana. Pihak yang dimaksud tidak terlibat dalam kejahatan yang dilaporkan. *Whistleblower* memiliki peran yang penting untuk mengubah kondisi organisasi menjadi lebih baik[3]

Dalam sebuah manajemen ada beberapa permasalahan yang sering terjadi. Baik permasalahan yang berasal dari internal maupun permasalahan yang disebabkan oleh pihak eksternal. Menjadi seorang *whistleblower* bukanlah perkara yang mudah.Seorang *whistleblower* kerap kali mengalami dilematis, di satu sisi dia dianggap sebagai penghianat karena telah mengungkap rahasia atau kesalahan seseorang yang dikenal. Di sisi lain dia dianggap sebagai pahlawan heroik yang menjunjung tinggi moral, sehingga dia akan "meniup peluit" ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak etis. Sekalipun orang tersebut adalah guru, dosen ataupun petinggi instansi sekalipun jika memang terbukti bersalah.

Peran *whistleblower* merupakan salah satu bentuk pengawasan kinerja suatu organisasi. Hal ini dikarenakan *whistleblower* dapat diperankan oleh siapa saja yang mengetahui tindak kecurangan atau bahkan pelanggaran dalam sebuah organisasi. Namun tidak sedikit orang yang enggan untuk mengadukan tindak kecurangan, karena tidak sedikit risiko yang harus dihadapi, bahkan sulit untuk dihindari dan mengakibatkan mereka lebih memilih untuk diam. Mulai dari ancaman terlapor pada dirinya maupun

[2]Semendawai, dkk, *Memahami Whistleblower,* (Jakarta: *LPSK,* 2011), 1.
[3] Ibid.,4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya dan bahkan ancaman pemecatan. Oleh karena itu jaminan keamanan dan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* juga ada sejak tahun 2006 dengan lahirnya UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal tersebut merupakan salah satu motivasi seorang untuk menjadi *whistleblower*.

Menurut Ajzen dalam Davitri perilaku seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sangat dipengaruhi oleh niat. Sehingga niat tersebut dapat digunakan sebagai *prediktor* kemauan seseorang dalam berperilaku. Niat berperilaku merupakan indikasi kesiapan seseorang untuk melakukan perilaku, sehingga niat berperilaku merupakan *anteseden* langsung dari perilaku itu sendiri.[4]

Begitupun dengan niat melakukan *whistleblowing*.Seseorang yang melakukan *whistleblowing* telah mengetahui konsekuensi yang akan diterima jika ia melaporkan suatu tindakan kecurangan atau tidak terpuji lainnya. Namun mereka tetap memilih untuk melakukan hal tersebut, walaupun akan mengancam karir atau bahkan kehidupan pribadinya. Jadi merupakan suatu kewajaran jika penghargaan dan perlindunganhukumdiberikan kepada mereka yang mempunyai keberanian untuk mengungkapkan kebenaran di atas segalanya.

Whistleblowing merupakan sebuah proses kompleks yang melibatkan karakteristik individual dan faktor-faktor situasional lainnya. Karakteristik

---

[4] Ajzen Icek, *"The Theory of Planned Behavior. In P. A. M. Lange, A. W. Kruglanski & E. T. Higgins (Eds.)". Handbook of Theories of Social psychology (Vol. 1, pp. 438-459),* (London, UK: Sage, 2012), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

individual tersebut diantaranya adalah pertimbangan etis, *lotus of control* dan komitmen organisasi. Sedangkan faktor situasionalnya terdiri dari keseriusan pelanggaran dan status pelanggaran.[5]

Dalton dan Radke menemukan bahwa organisasi dengan lingkungan etis yang baik berpengaruh terhadap intensi melakukan *whistleblowing.* Organisasi dalam lingkungan etika yang baik dapat diciptakan dengan mengadakan pelatihan bagi karyawannya.[6] Selain lingkungan etis, sosialisasi yang bertujuan untuk menyampaikan program terkait *whistleblowing* sangat diperlukan. Agar seluruh lapisan dapat mengetahui adanya sistem *whistleblowing.*

Menindaklanjuti berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola *Whistleblowing System* (WBS) Pengadaan Barang/Jasa Kementrian Agama Tahun Anggaran 2014, maka setiap instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama harus memiliki sistem *whistleblowing.*

Tim pengelola *Whistleblowing* Sistem (WBS) pengadaan barang/jasa kementerian Agama memiliki tugas:[7]

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme(KKN) dalam pengadaan barang/jasa

---

[5] Ahmad Sukrisno, *"Auditing, Petunjuk Praktis Pemeriksaan Oleh Akuntan Publik"*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 5

[6] Dalton, dkk, *"The Joint Effects of Machiavellianism and Ethical Environment on Whitle-blowing",* (Sprianger Science + Bussiness Media Dordrecht, 20012), 162.

[7] Menteri Agama Republik Indonesia, *"Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Pengelola Whistleblowing Sistem (WBS) Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama Tahun Anggaran 2014",* dalam https://lpse.kemenag.go.id/eproc/regulasi, diakses pada 20 April 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan barang/jasa
3. Melaporkan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan pengadaan barang/jasa dalam proses pemilihan penyediaan barang/jasa
4. Melaporkan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan kontrak yang tidak/belum terdapat indikasi tindakan pidana
5. Melaporkan hasil kerjanya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama

Dalam rangka mensosialisasikan program tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya penyuluhan atau sosialisasi langsung, serta memasang pamflet serta ajakan di media sosial untuk ikut serta menjadi kontrol *(social control)* terhadap kinerja Kementerian Agama Kegiatan. Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan pencegahan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang sedang berlangsung antara lain Sosialisasi ZI-WBK (Zona Integritas-Wilayah Bebas Korupsi), Pegawasan dengan Pendekatan Agama (PPA), dan pengisian LHKASN (Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN))

Upaya Kementerian Agama Republik Indonesia merupakan wujud bagian dari Reformasi Birokrasi terkait dalam hal pungutan, pengawasan dan peningkatan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, adapun akses untuk penyampaian pengaduan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat atau Dumas adalah www.kemenag.go.id dan www.itjen.kemenag.go.id.

Tidak terkecuali UIN Sunan Ampel yang notabene merupakan instansi di bawah naungan Kementerian Agama, dengan mempublikasikan dengan pamflet yang terpasang di area instansi.Langkah yang diambil oleh UIN Sunan Ampel ini menjadi salah satu aktifitas yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Dimana pihak instansi telah menerapkan sistem *whistleblowing* dengan memberikan akses lebih kepada siapa saja yang mau memberikan informasi tentang kesalahan atau pelanggaran yang ada dalam lingkup kampus. Namun yang menjadi persoalan yaitu tidak semua mahasiswa yang mengetahui adanya sistem tersebut. Dengan demikian mahasiswa sering mengalami kebingungan hendak melaporkan kepada siapa dan kesalahan serupa terjadi berulang kesekian kalinya. Perlu kiranya adanya kegiatan sosialisasi dengan harapan semua lapisan civitas akademika dapat mengetahui adanya sistem tersebut. Selain itu ada beberapa persoalan yang telah terjadi di UIN Sunan Ampel sendiri yang sebenarnya merupakan penyebab harus adanya sitem *whistleblowing* yaitu:

1. Pembagian buku Mata Kuliah Dasar (MKD) mengalami keterlambatan. Buku MKD yang seharusnya dibagikan pada semester pertama namun pembagian baru terlaksana pada semester kedua.
2. Keterlambatan pembagian jas almamater UINSA yang dibagikan hampir setahun dari proses penerimaan mahasiswa baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Proses transparansi dana dan pelaksanaan praktikum mahasiswa Ekonomi Syariah yang dirasa masih kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi yang menyangkut suatu kebijakan atau peraturan terutama tentang konsep pembangunan dan perbaikan instansi terkait sangat dibutuhkan, apalagi peraturan tersebut bersifat baru. Masalah secara umum dapat disebutkan sebagai suatu yang dapat menimbulkan kondisi negatif, sehingga terjadi ketidakpuasan. Dalam hubungan dengan perbaikan sistem melalui penerapan *whistleblowing,* permasalahan yang ada dapat diketahui melalui laporan dari para *whistleblower* yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan tujuan akhir perbaikan sistem.

Persoalan pembangunan pada prinsipnya adalah menyangkut nasib kehidupan seluruh lapisan civitas akademika, dalam hal ini tataran universitas. Maka idealnya kebijakan yang akan dan telah ditetapkan perlu diketahui oleh publik agar tidak terjadi kesalahpahaman atau yang sering disebut *miss communication* antara pihak yang menetapkan kebijakan dengan pihak penggerak kebijakan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Maidah ayat 67:

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ

رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٦٧

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

67. Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.[8]

Dari ayat diatas sangat tegas sekali perintah untuk menyampaikan amanat. Maka sangat ironi sekali jika suatu program atau kebijakan tidak disosialisasikan atau sekedar sosialisasi tidak merata. Partisipasiseluruh lapisan elemen civitas akademika dalam pembenahan sistem tidak bisa dikesampingkan, sebab di tengah lapisan civitas yang heterogen dengan berbagai latar belakang etnis yang berbeda terdapat berbagai sistem sosial yang condong memiliki sifat dan sikap yang aktif dan senantiasa mengawal proses sistem yang ada di instansi terkait. Khalayak pada dasarnya sama sekali tidak bersifat pasif, melainkan aktif, sehingga antara komunikator dan komunikan bukan saja terjadi saling berhubungan tetapi juga dapat saling dipengaruhi oleh komunikan atau khalayak.[9]

Dalam sebuah instansi pendidikan, tidak jarang terdapat perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi, sehingga acapkali membuat para civitas, mahasiswa khususnya menjadi kecewa. Dengan kata lain, keluhan timbul sebagai pernyataan tidak terpenuhinya kepentingan seseorang atau suatu kelompok dalam masyarakat. Dimana partisipasi masyarakat dianggap suatu yang paling penting.

Oleh karena itu peneliti ingin membahas tentang "PENGARUH SOSIALISASI DAN PERILAKU ETIS TERHADAP NIAT

[8] Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2010), 435.
[9] Anwar arifin, *Strategi Komunikasi*, (Bandung : CV Armico, 1984), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MAHASISWAMELAKUKAN *WHISTLEBLOWING* DI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA"

B. Rumusan Masalah

1. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap niat mahasiswa melakukan *whistleblowing*?
2. Apakah perilaku etis berpengaruh terhadap niat mahasiswa melakukan *whistleblowing?*
3. Apakah sosialisasi dan perilaku etis berpengaruh secara simultan terhadap niat mahasiswa melakukan *whistleblowing?*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi terhadap niat mahasiswa melakukan *whistleblowing*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perilaku etis terhadap niat mahasiswa melakukan *whistleblowing*.
3. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi dan perilaku etis secara simultan terhadap niat mahasiswa melakukan *whistleblowing*.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan akandapat memberikan beberapa manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara terperinci manfaat penelitian ini antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bidang Teoretis
   a. Dapat memberikan kontribusi secara teoretis terhadap ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan sosialisasi, perilaku etis dan *whistleblowing system.*
   b. Dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah sosialisasi, perilaku etis dan *whistleblowing system.*
2. Bagi Praktis
   a. Dapat dijadikan input bagi pihak rektorat UIN Sunan Ampel Surabaya dalam menetapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya memperbaiki, mempertahankan atau meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengacu pada tridarma perguruan tinggi.
   b. Sebagai dasar untuk meningkatkan atau mempertahankan mutu pelayanan agar mampu bersaing dengan sesama perguruan tinggi lainnya dalam bidang pendidikan.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam proposal ini akan dijabarkan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian dan sistematika penulisan proposal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua berisi kajian pustaka yang mengemukakan landasan teori dimulai dari *grand theory* yaitu analisis perilaku konsumen, dilanjutkan mengenai pengertian sosialisasi, perilaku etis dan *whistleblowing*.Kemudian beberapa penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual, dan hipotesis.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang memuat jenis penelitian yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, definisi operasional, uji validitas dan reliabilitas, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat berisi hasil penelitian yang menjabarkan deskripsi umum objek penelitian berupa pemaparan data yang memuat informasi tentang lokasi atau institusi yang menjadi objek penelitian serta karakteristik responden yang dijadikan sampel dalam penelitian dan analisis data yang memuat data penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian.

Bab kelima berisi pembahasan yang terdiri dari temuan hasil penelitian berisi tentang gagasan peneliti, keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan terhadap teori-teori dan temuan-temuan sebelumnya serta penafsiran dan penjelasan terkait temuan di lapangan yang menjawab hipotesis (jawaban sementara) sebelumnya.

Bab keenam berisi penutup yang memuat simpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id